

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI NOTARIS DALAM PERALIHAN

HAK ATAS MEREK

Andhita Fatmawati¹, Bambang Winarno², Bambang Sudjito³

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341)

566505

Email: andhita2009@gmail.com

Abstract

A form of the results of operations or trading services can be referred to as Trademarks or service brand. The meaning of "brand itself is a sign in the form of images, names, numbers, color composition or a combination of these elements that have distinguishing features and used in the trading of goods or services. Brand is an intangible object to be transferred one of them with their rights to the trademark transfer agreement. In the transfer of rights to the brand, the notary functions in the transfer deed. The purpose of this study was to determine and analyze the function of the notary in the deed transfer of the brand and analyze the responsibilities of notaries in providing legal protection for the company considering the brand is intangible objects. The legal materials collection techniques with the use of primary law and secondary law. The journal is compiled with normative juridical research method with the approach of legislation and conceptual. Based on the survey results revealed that the transfer of rights to the brand can be done in 4 ways according to law number 15 of 2001 that is by inheritance, wills, grants, and the agreement, then the agreement is authorized notary in it and the responsibility notary in providing legal protection by way of preventive and repressive to see legitimate requirement clause of the agreement and provide an understanding of law to the parties in order that one of them did not feel disadvantaged.

Key words: agreement, notary public function, right brand

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Suatu bentuk hasil usaha jasa atau dagang dapat disebut sebagai Merek dagang atau Merek jasa. Yang dimaksud dari “merek sendiri adalah tanda yang berupa gambar, nama, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda serta digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan benda tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya salah satunya dengan adanya perjanjian pengalihan hak atas merek. Dalam pengalihan hak atas merek tersebut maka notaris berfungsi dalam pembuatan akta pengalihannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi notaris dalam pembuatan akta pengalihan atas merek dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya mengingat merek merupakan benda tidak berwujud. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan hak atas merek dapat dilakukan dengan 4 cara menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001 yaitu dengan pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian, maka dalam perjanjian notaris berwenang di dalamnya dan dalam pertanggungjawaban notaris dalam memberikan perlindungan hukumnya dengan cara preventif dan represif dengan melihat klausul syarat sah perjanjian dan memberikan pemahaman hukum kepada para pihak agar salah satunya tidak merasa dirugikan.

Kata kunci: perjanjian, fungsi notaris, hak atas merek

Latar Belakang

Perdagangan jika dilihat secara global dapat dipertahankan jika seseorang atau beberapa orang melakukan persaingan usaha secara tertib dan berdasarkan undang – undang, maka setiap orang atau suatu perusahaan memerlukan perlindungan hukum atas barang atau jasa yang telah diciptakan, agar suatu perusahaan tidak dirugikan dengan adanya klaim dari pihak atau perusahaan lain yang memiliki kemiripan dengan hasil usaha atau produk dari perorangan atau perusahaan. Suatu bentuk hasil usaha jasa atau dagang dapat disebut sebagai Merek dagang atau Merek jasa. Yang dimaksud dari “merek sendiri adalah tanda yang berupa gambar, nama, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda serta digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”⁴

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2001 tentang **Merek**.

Saat dikeluarkannya Undang-Undang Merek baru terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan – ketentuan dalam Undang- Undang Merek lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang merek baru, Undang- Undang yang mengatur Merek baru ini adalah Undang- Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang dibentuk dengan dasar pemikiran⁵:

1. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi- konvensi yang sudah di buat atau dibentuk Undang-Undangnya di Indonesia, Merek memiliki peranan yang penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha sehat.
2. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf b, serta memperhatikan dari pengalaman yang ada dalam melaksanakan Undang-Undang merek, dianggap perlu untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek dan sekarang dikodifikasi menjadi Undang-Undag nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Istilah merek yang ada dan dijelaskan di dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dibagi menjadi dua macam, diantaranya merek dagang dan merek jasa, dengan penjelasannya yaitu:

1. “Merek dagang merupakan Merek yang dipergunakan pada barang yang akan diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya.”⁶
2. “Merek jasa ialah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya.”⁷

⁵ Ahmudi Miru, **Hukum Merek**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang **Merek**.

⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang **Merek**.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau perdagangan, dalam menyelesaikan sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu pengadilan Niaga, sehingga permasalahan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu relatif cepat. Sejalan dengan permasalahan yang ada, perlu adanya aturan hukum acara khusus untuk menyelesaikan permasalahan sengketa merek seperti halnya pada bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya.⁸ Merek yang sudah didaftarkan menjadi merek terdaftar dimana merek itu sudah mendapat perlindungan hukum di bawah Undang- Undang, perlindungan atas merek tersebut memiliki jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, jika jangka waktu merek telah habis, maka seseorang atau badan usaha dapat memperpanjang perlindungan merek sesuai aturan yang ada di dalam Undang-Undang Merek.

Hak Milik yang terkandung di dalam Hak merek dapat dialihkan sesuai dengan KUH Perdata pasal 584, yaitu:

“ Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang- Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”

Cara pengalihan hak merek terdaftar sendiri diatur di dalam Undang – Undang nomor 15 tahun 2001 pasal 40 ayat (1), yaitu:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian atau;
5. Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berbagai cara pengalihan hak merek dapat dilakukan, salah satunya dengan menggunakan perjanjian jual beli. Di dalam KUH Perdata pasal 1457 menjelaskan bahwa:

⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

“Jual beli ialah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”⁹

Meskipun perjanjian tersebut mengikat para pihak dan sudah dicapainya kata sepakat hak milik tersebut belum mutlak dimiliki, hak tersebut dapat mutlak dimiliki jika sudah terjadi proses penyerahan (*Levering*). Dalam pembuatan perjanjian jual beli seseorang pastilah membutuhkan suatu kepastian dan keadilan hukum dengan adanya suatu tulisan atau bukti tertulis dalam proses perjanjian tersebut. Di dalam pasal 1867 BW menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Akta otentik yang dibuat di dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang diberi wewenang dan ditempat akta tersebut dibuat.¹⁰ Yang dimaksud disini adalah pejabat hukum yang bertugas membuat akta notariil sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu perjanjian.

Profesi hukum yang dimaksud tersebut adalah seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya . Akta otentik adalah akta yang memuat kebenaran formil, maka seorang notaris memiliki kewajiban menjelaskan kepada para pihak bahwa apa yang termuat dan tercantum dalam akta adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan keduanya telah memahami dari apa isi akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

Perjanjian pengalihan hak atas merek jika didengar tentulah sangat abstrak, karena merek sendiri merupakan benda tidak berwujud. Sebelum melakukan perjanjian tersebut maka seorang Notaris harus memahami penggolongan- penggolongan benda yang ada di dalam peraturan yang ada. Di dalam perjanjian diatas maka akan timbul suatu wacana tentang peralihan hak atas merek tersebut, sehingga seorang notaris tidak begitu saja membuatan akta

⁹ Pasal 1457 KUH Perdata.

¹⁰ Pasal 1868 BW.

notariil kepada para pihak dalam perjanjian terhadap kedua belah pihak. Wacana yang dapat digambarkan adalah bagaimana seseorang bisa menilai atau mengukur harga suatu objek perjanjian jika benda tersebut merupakan benda tidak berwujud? Sehingga tugas dan fungsi Notaris disini sangatlah penting, karena notaris juga turut bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya juga memberikan pemahaman hukum bagi para pihak dan para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan nantinya dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana fungsi Notaris dalam pembuatan perjanjian peralihan hak atas Merek jika dilihat di dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek hanya disebutkan pengalihan hak atas merek dengan menggunakan perjanjian saja dan tidak dijabarkan bentuk perjanjian lebih jelasnya?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terkait jabatannya dalam memberikan informasi hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta jual beli jika para pihak yang datang menghadap akan melakukan perjanjian jual beli merek mengingat merek merupakan benda yang tidak berwujud?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).¹¹ Pendekatan undang-undang dilaksanakan dengan menerima seluruh undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Suatu penelitian normatif dapat menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi dengan teknik

¹¹ Mahmud Marzuki, Peter, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-11, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

¹² *Ibid.*

content analysis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹³

Pembahasan

A. Fungsi Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Peralihan Hak atas Merek jika dilihat di dalam pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Hukum benda di Indonesia di dalam hakikatnya dijabarkan dan diatur di dalam buku II KUHPerdara, dengan pengaturannya di dalam konteks hukum perdata hukum benda merupakan suatu hal atau sesuatu yang bisa diberikan atau dilekatkan sesuatu diatasnya dan setiap hak yang bisa dikuasai oleh hak milik. Di dalam buku II KUHPerdara yang mengulas segala hal sesuatunya tentang benda dapat di klasifikasikan beberapa macam penggolongan benda diantaranya benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang bisa dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis, benda yang telah ada dan benda yang akan ada, benda di dalam perdagangan dan benda di luar dari perdagangan, benda yang bisa dibagi dan benda yang tidak bisa dibagi.

Perbedaan diantara penggolongan benda berdasarkan aturan KUHPerdara salah satu diantaranya yang dapat dijadikan dasar penentuan macam benda yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah jika suatu benda merupakan benda berwujud adalah benda bergerak maka pemindahtanganan atas barang itu harus secara nyata dari tangan ke tangan jika benda berwujud merupakan benda tidak bergerak maka pemindahtangannya harus dilakukan menggunakan balik nama. Hak Merek, Hak cipta atau hak paten dan yang termasuk di dalam Hukum Kekayaan Intelektual digolongkan di dalam benda bergerak yang tidak berwujud, dari hak yang telah dilekatkan di dalam hak merek tersebut sesungguhnya tidak

¹³ Burhan Bungin, 2007, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

langsung melekat pada suatu benda itu, melainkan hak dari benda itu untuk melakukan sesuatu.

Hak atas suatu merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara untuk pemegang Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu tertentu dengan memakai sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya, merek tersebut diberikan kepada pemohon yang memiliki itikad baik, yaitu pemohon yang mendaftarkan merek yang dimilikinya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk memanfaatkan, melakukan tiruan atau menjiplak popularitas merek pihak lain yang menimbulkan suasana persaingan yang curang, menipu atau menyesatkan konsumen.¹⁴

Pengalihan hak atas merek sendiri dapat dialihkan atau beralih di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyebutkan merek dapat beralih dengan cara:

1. Pengalihan hak melalui Pewarisan

Di dalam pasal 830 KUHPdata menjelaskan bahwa pewarisan hanya dapat berlangsung jika dengan adanya kematian, sehingga dapat diambil pengertian bahwa jika pewaris belum meninggal maka tidak akan terjadi adanya pewarisan dimana pewaris mewariskan segala kepemilikannya kepada ahli waris yang berhak menerima hak tersebut. Pewarisan akan diberikan kepada seorang atau seseorang yang memiliki hubungan darah atau dengan hubungan perkawinan. Dalam pasal 832 ayat (1) dan pasal 852a KUHPdata menjelaskan bahwa “*dalam ketentuan Undang-undang dimana yang memiliki hak menjadi seorang ahli waris adalah keluarga yang sedarah baik secara sah menurut Undang-undang ataupun yang di luar dari perkawinan atau suami atau istri yang hidup terlama*”,

Segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh pewaris dalam hal ini secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, untuk ketentuan jika yang diwariskan disini merupakan sebuah merek dagang atau jasa dalam pengalihannya pun harus tetap dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HKI.

¹⁴ Farida Hasyim, **Hukum Dagang**, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 209.

2. Pengalihan hak melalui hibah

Hibah yang diatur di dalam pasal 1666 KUHPerdota menjabarkan pengertiannya yaitu yang dimaksud daripada hibah adalah dimana suatu perjanjian dimana penghibah di saat hidupnya telah menyerahkan suatu benda secara cuma- cuma dan tidak bisa ditarik kembali, undang-undang disini tidak mengakui hibah lainnya selain hibah orang yang masih hidup.¹⁵ Di dalam hibah hanya memperbolehkan benda-benda yang telah ada, apabila hibah mencangkup benda-benda yang baru akan ada pada kemudian hari maka hibah tersebut tidak dianggap ada atau hibah tersebut batal.¹⁶

Penerima hibah dalam ketentuannya dengan secara alami telah menerima segala hak dan kewajiban dari si pemberi hibah,. Jika di dalam pengalihan disini yang dimaksud adalah pengalihan hak merek secara hibah untuk mendapat suatu kepastian hukum dalam kepemilikan merek baru si penerima hibah juga berkewajiban untuk mengajukan permohonan pengalihan hak merek kepada Ditjen HKI, sebagai syarat-syarat atau ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhinya pun tidak jauh beda dengan persyaratan yang sudah ditentukan pada pengalihan hak atas merek dengan cara pewarisan dimana penerima hibah juga harus melampirkan nama Merek dan sertifikatnya, surat kuasa khusus Surat kuasa khusus jika permohonan pengalihan hak merek tersebut diajukan melalui kuasa terdaftar yaitu sebagai Konsultan HKI di Ditjen HKI, salinan akta hibah.

Dengan segala ketentuan dan syarat yang telah dipenuhi dengan menunggu jangka waktu yang telah ditentukan oleh Ditjen HKI maka penerima hibah telah secara sah mendapatkan hak merek baru yang telah dihibahkan dan juga telah dicatatkan di dalam berita resmi merek.

3. Pengalihan hak melalui wasiat

Wasiat diatur di dalam KUHPerdota yang tercantum di dalam pasal 875 KUHPerdota dengan bunyi “*surat wasiat atau sebuah testamen adalah sebuah akta yang berisikan pernyataan dimana seseorang memiliki kehendak yang telah*

¹⁵ Pasal 1666 KUHPerdota.

¹⁶ Pasal 1667 KUHPerdota.

dikehendaknya akan terjadi setelah dia meninggal dimana bisa dicabut kembali olehnya.”

Bisa dikatakan jika dalam membuat wasiat ialah perbuatan hukum dengan sepihak karena hal itu sangat berhubungan dengan sifat (*herroe pelijkhed*) atau bisa dicabut dari ketetapan surat wasiat, ketetapan dari surat wasiat ini memiliki dua ciri yakni bisa dicabut dan hanya berlaku dengan kematian seseorang, sehingga dapat dikatakan jika membuat surat wasiat atau testament merupakan perbuatan hukum karena seseorang telah menentukan tentang harta yang terjadi atau kekayaan yang ditinggalkan setelah ia meninggal.

Suatu testament atau wasiat dibuat oleh seorang notaris, pihak penghadap yaitu pemberi dan penerima daripada wasiat tersebut. Seorang notaris dalam ketentuannya akan membuatkan akta yang diminta oleh para pihak itu dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peranan notaris di dalam pembuatan wasiat dicantumkan di dalam pasal 938 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa *“wasiat yang menggunakan akta umum harus dibuat dihadapan pejabat notaris dan dua orang saksi”*, pasal 939 mengatur lebih rinci mengenai wasiat dimana *“Notaris harus menulis atau membuat apa yang menjadi kehendak pewaris dengan kata-kata yang jelas dengan apa adanya dan disampaikan oleh pewaris, jika dalam penyampaian persoalan dilakukan dengan tidak dihadiri oleh para saksi dan naskah sudah disiapkan oleh notaris maka pewaris tersebut wajib mengemukakan lagi apa yang menjadi kehendak yang dimaksudnya seperti apa adanya dihadapan para saksi sebelum dibacakan oleh notaris di depan pewaris, setelah itu notaris berkewajiban untuk membacakan wasiat tersebut di depan para penghadap hingga para penghadap setuju dan faham akan isi daripada wasiat tersebut, selanjutnya akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak yaitu pewaris, notaris, serta saksi-saksi, jika pewaris tidak bisa melakukan penandatanganan maka harus dicantumkan sebab halangan itu dan dengan tegas dicantumkan dalam akta wasiat itu.”*¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 287.

4. Pengalihan hak atas Merek melalui perjanjian dalam bentuk akta Notaris

Perjanjian adalah hubungan seorang atau seseorang dengan pihak lainnya dalam perbuatan hukumnya dapat mengikat satu sama lain, seperti sewa menyewa, jual beli, utang piutang, dan lainnya. Di dalam perjanjian pengalihan hak merek jika dikaji mengapa harus menggunakan akta notaris atau perjanjian secara tertulis di hadapan notaris mengapa tidak cukup dengan menggunakan perjanjian dibawah tangan, dari beberapa ketentuan terdapat beberapa pengertian atas perbedaan dari perjanjian yang dibuat di bawah tangan dan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris di dalam bentuk akta Notarial, diantaranya:

a. Perjanjian di bawah tangan

Dapat dijabarkan bahwa pengertian dari perjanjian di bawah tangan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak satu dengan yang lain dan saling mengikat diantara keduanya yang memiliki kepentingan yang bersangkutan dengan tidak melibatkan pejabat-pejabat yang berwenang membuat akta diantaranya Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), atau pejabat lainnya yang memiliki wewenang untuk itu. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak di dalam perjanjian akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga, sehingga jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga, para pihak atau salah satunya harus mengajukan bukti-bukti yang dibutuhkan agar membuktikan bahwa keberadaan yang diajukan pihak ketiga tidak berdasar dan tidak bisa dibenarkan.

b. Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk akta notariil.

Akta Notariil merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang diantaranya Notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Camat dan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut merupakan jenis dokumen yang merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian ataupun pihak ketiga, terdapat 3 fungsi akta notariil atau akta autentik adalah:

1. Menjadikan bukti jika para pihak telah melakukan perjanjian
2. Sebagai alat bukti bagi para pihak penghadap bahwa hal-hal yang telah tertulis di dalam perjanjian tersebut merupakan kehendak dan keinginan dari keduanya.
3. Sebagai alat bukti terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh kedua penghadap terkecuali ditentukan sebaliknya, keduanya telah mengadakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam perbedaan diantara keduanya dapat dijadikan argumen yang kuat bahwa dalam peralihan hak atas merek lebih tepat menggunakan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris karena akta notariil merupakan alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian peralihan hak atas merek dengan menggunakan perjanjian dalam hal ini jual beli para pihak juga harus memenuhi segala ketentuan yang sudah ditentukan oleh Ditjen HKI sebagai syarat pemindahtanganan hak milik berupa merek dari pihak yang lama (penjual) dan pihak yang baru (pembeli) ketentuan tersebut diantaranya:

1. Salinan akta Notaris tentang pengalihan hak merek atau akta jual beli merek.
2. Sertifikat Merek yang sudah terdaftar oleh pemegang terdahulu.
3. Surat kuasa khusus jika permohonan pengalihan hak merek tersebut diajukan melalui kuasa terdaftar yaitu sebagai Konsultan Hki di Ditjen HKI .

Dengan demikian Notaris sangat berfungsi dalam perjanjian peralihan hak atas merek tersebut karena selain yang sudah ada dalam ketentuan yang dimuat di dalam persyaratan pengalihan hak atas merek dengan perjanjian di Ditjen HKI dimana untuk pengalihannya harus dilampiri dengan salinan akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris, mengapa harus akta notariil? Karena perjanjian yang dibuat dengan dihadapan Notaris ini bersifat memastikan dan Notaris juga melegalisasi tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian, sehingga timbul kepastian hukum secara legal yang berupa akta notariil sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan pengadilan jika terjadi suatu sengketa atau permasalahan hukum yang ditimbulkan dari perjanjian peralihan hak atas merek tersebut. Dengan melihat kewenangannya juga yang ada di dalam pasal 15 ayat (1) UUJN

dimana seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dalam semua hal perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah diwajibkan oleh undang-undang atau yang telah dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuatkan di dalam suatu akta autentik dimana dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberi grosse akta, salinan serta kutipan akta dari seluruhnya yang ada itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak itugaskan kepada pejabat lainnya yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

B. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Konsultan Hukum Agar Tidak Ada Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Jika Para Pihak Yang Datang Menghadap Akan Melakukan Perjanjian Jual Beli Merek Dan Berkenaan Dengan Harga, Mengingat Merek Merupakan Benda Yang Tidak Berwujud

Notaris merupakan profesi dimana seseorang harus bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi yang disandangnya sebagai pejabat yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tepat yang berani dalam melakukan hal tindakan hukum yang sesuai dengan sumpah jabatannya. Tanggung jawab Notaris di dalam profesinya lahir dari adanya kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang jabatan notaris yang berlaku setelah dia mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris hingga diangkat menjadi pejabat umum yang ditunjuk oleh negara dalam pembuatan akta Notariil. Akta-akta notariil yang dibuat oleh notaris secara langsung menjadi bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sempurna di dalam pembuktiannya.

Selain menjadi seseorang yang bisa dipercaya dalam pembuatan akta seorang Notaris juga memiliki kewajiban dalam prakteknya untuk menjadi konsultan hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pihak yang menghadap kepadanya agar dalam pembuatan perjanjian diantara para pihaknya tersebut tidak ada yang merasa dirugikan dan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam pasal 15 UUJN ayat (1) yang menjadi kewenangan seorang notaris adalah berwenang dalam pembuatan akta autentik mengenai segala hal dalam

perbuatan maupun perjanjian dan penetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau yang telah disepakati oleh para pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan di dalam akta autentik tersebut serta menjamin segala kebenaran yang telah dicantumkan di dalamnya itu, selain yang dicantumkan di dalam pasal 15 ayat (1) UUPJN terdapat kewenangan lainnya yang juga harus diberikan kepada para pihak yang menghadap yaitu di dalam pasal 15 ayat (2) huruf e yang menjabarkan bahwa seorang Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan di dalam pembuatan akta yang diminta oleh para pihak.

Tanggung jawab Notaris sebagai konsultan hukum dalam perjanjian pengalihan hak atas merek sangatlah penting mengingat merek merupakan benda yang tidak berwujud. Pemahaman hukum secara konkrit harus diberikan dengan seksama sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Tanggung jawab yang diberikan melalui dua cara yakni memberikan perlindungan hukum kepada para pihaknya dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

1. Tanggung jawab Notaris dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif

Ketika datang para pihak menghadap kepada seorang notaris untuk melakukan suatu perjanjian tentunya seorang pejabat notaris tidak begitu saja membuat akta yang diminta oleh para pihak tersebut, karena seorang notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya dituntut untuk lebih berhati-hati dalam pembuatan aktanya. Dalam perjanjian pengalihan jual beli merek pun juga perlu kehati-hatian mengingat merek merupakan benda yang tidak berwujud yang sulit dinilai. Permasalahan harga atau nilai nominal juga menjadi sangat sulit untuk diukur jika diperhatikan, maka langkah yang harus diperhatikan oleh seorang notaris sebelum membuat atau mengeluarkan akta tersebut adalah:

- a. Memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPerdata)
 - 1) Adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan hal yang paling penting di dalam melakukan perjanjian karena kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak dan pernyataan antara satu orang atau lebih. Para penghadap jika dalam hal ini sudah melakukan kesepakatan ini maka akan terjadi pengalihan hak atas merek yang telah disepakati yang setelahnya juga hak dan kewajiban dari seluruh kebendaan tersebut akan beralih kepada pembeli. Notaris di dalam fungsinya dalam hal ini adalah membuat akta peralihan hak atas merek tersebut, dengan memperhatikan isi dari akta dengan seksama yakni secara adil dan tidak memihak salah satunya, membacakan isi dari akta perjanjian tersebut sehingga jelas dan tersampaikan makna isi perjanjiannya, kemudian memastikan keduanya telah bertanda tangan di akhir akta tersebut dan diberikan juga stempel notaris yang berlambangkan negara Republik Indonesia serta tanda tangan notaris tersebut yang menandakan bahwa perjanjian itu telah dibuat dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang atas pembuatan akta notariil yaitu pejabat Notaris.

- 2) Kecakapan untuk membuat membuat suatu perikatan atau kecakapan bertindak

Di dalam pembuatan suatu perjanjian haruslah dengan kecakapan dan kemampuan di dalam melakukan perbuatan hukum seperti halnya yang sudah dituangkan di dalam undang-undang. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, diantaranya:

1. Orang yang belum dewasa, di dalam KUHPerdara menuangkan di dalam pasal 330 yang menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa ialah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan seseorang tersebut belum pernah kawin, jika perkawinan tersebut telah bubar sebelum genap umur dua puluh satu tahun maka bukan berarti kembali dalam keadaan yang belum dewasa.
2. Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, seseorang yang ada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat bebas dengan harta yang dia miliki, hal tersebut merupakan padangan menurut hukum.. di dalam pasal 433 KUHPerdara telah menyebutkan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan yaitu, orang yang dalam keadaan dungu, orang yang gila atau

tidak waras atau sakit otak, orang yang gelap mata, dan seseorang yang telah dewasa juga dapat berada dibawah pengampunan karena sifat keborosannya.

3. Seorang wanita yang di dalam ketentuannya ditentukan oleh undang undang yang telah melarang untuk membuat perjanjian tertentu, akan tetapi saat ini seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. SEMA No.3 tahun 1963.
- 3) Suatu hal tertentu

Yang dimaksudkan dari suatu perjanjian harus dengan hal tertentu adalah segala hal yang telah diperjanjikan merupaka hak dan kewajiban kedua pihak yang telah membuat perjanjian jika nantinya timbul suatu perselisihan, sehingga barang yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut harus ditentukan jenisnya, seperti sudah ada atau sudah ada di tangan yang telah berutang pada saat perjanjian itu dibuat, dengan demikian dapat diartikan bahwa suatu hal tertentu merupakan sesuatu yang telah diperjanjikan atau yang akan menjadi objek dari perjanjian haruslah jelas dapat ditentukan jenisnya.¹⁸ Dapat dijelaskan di dalam KUHPerdara tentang syarat objek perjanjian, diantaranya:

1. Pasal 1332 KUHPerdara menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian haruslah barang-barang yang dpat diperdagangkan saja.
2. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan jika suatu perjanjian harus mempunyai pokok jika suatu barang tersebut sudah ditentukan jenisnya, di sisni jumlah barang bisa saja tidak tertentu asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan dan dihitung jumlahnya.
3. Pasal 1334 KUHPerdara menyatakan bahwa barang yang akan dijadikan objek perjanjian merupakan barang yang baru akan datang pada waktu yang akan datang dan tidak dapat menjadi objek daripada perjanjian adalah objek kontrak barang yang masih ada di dalam warisan yang belum terbuka.
- 4) Adanya causa yang halal

¹⁸ Dedy Ismatullah, *Op.cit.*, hlm. 221.

Suatu sebab yang halal yang dimaksud adalah tentang sebab perjanjian itu dibuat dan suatu sebab merupakan terlarang jika hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Adapun jika syarat pertama dan kedua dari unsur perjanjian tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut, dan jika syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan adanya causa halal tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat batal demi hukum karena syarat yang pertama dan kedua dari syarat sah nya perjanjian merupakan syarat subyektif dari suatu perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dari suatu perjanjian karena melekat pada perjanjiannya atau objek tersebut dari perbuatan hukum yang telah dilakukan.

2. Tanggung jawab Notaris dalam memberikan perlindungan hukum secara Represif

Tanggung jawab Notaris secara represif adalah bagaimana notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya jika akta yang dibuatnya menimbulkan sengketa diantara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. tanggung jawab notaris dapat dibagi atas tiga bagian yaitu tanggungjawab notaris secara keperdataan terhadap kebenaran materiil di dalam pembuatan akta yang telah dibuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang telah dibuatnya, tanggung jawab notaris yang bersarkan peraturan jabatan notaris atau UUN.

1. Tanggung jawab notaris secara perdata

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat daam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pertanggung jawaban perdata setelah pembuatan akta akan ada jika seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang digolongkan melawan hukum diantaranya:

a. Melanggar hak yang menjadi milik orang lain

Setiap orang pasti diberikan hak yang sama di depan hukum, hal tersebut diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak.

d. Bertentangan dengan kepatutan di dalam memperhatikan kepentingan diridan harta orang lain di dalam kehidupan sehari-hari

Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain melanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta

otentik yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).

2. Tanggung jawab Notaris secara Pidana dari akta yang telah dibuatnya

Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris maka pidana yang dimaksudkan adalah pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanahkan oleh UUJN, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum.

Unsur-unsur perbuatan pidana meliputi, yaitu :¹⁹

a. Perbuatan (manusia)

Perbuatan merupakan tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Moeljatno berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan manusia dalam undur-undur tindak pidana adalah kelakuan plus kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan.

b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur yang terkandung dalam aturan tersebut. Hal ini berasal dari adanya asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*"

c. Bersifat melawan hukum

Selain dua unsur di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.

Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UU Perubahan atas UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

¹⁹ Koeswadi, Hermien Hadiati, **Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana**, 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan jabatan notaris atau UUJN dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN

Tanggung jawab Notaris di dalam UUJN secara terperinci menyebutkan di dalam pasal 65 UUJN yang menjelaskan bahwa Notaris, Notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris harus bertanggung jawab atas setiap akta yang telah dibuatnya, meski protokol notaris telah diberikan dan dipindahkan kepada penyimpak protokol Notaris. Secara kode etik Notaris, Seorang notaris harus membuat akta dengan baik dan benar yang dibuat sesuai hukum dan permintaan dari para pihak yang akan melakukan perjanjian dan notaris harus membuat akta yang bermutu sesuai aturan hukum dan kesepakatan para pihak karena akta autentik dalam pembuktiannya menjadi alat bukti yang sempurna di depan hukum karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk berdasarkan aturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin, 2007, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hasyim Farida, 2009, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermien Koeswahyudi, 1995, **Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ismatullah Dedy, 2015, **Hukum Perdata**, Pustaka Setia, Bandung.

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-11, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang **Merek**.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.